

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
 - a. Jumlah narkoba yang dipakai
 - b. Mengedarkan narkoba kepada orang lain atau pengedar
 - c. Membuat atau memproduksi narkoba
2. Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pasal 54 dikatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

Bagi hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap penyalahgunaan narkoba seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba. Apabila penyalahgunaan narkoba di pidana penjara, lebih besar kemungkinan dia diajari kejahatan lain karena dia disatukan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, sedangkan penyalahgunaan narkoba merupakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Website:

Viva News. Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>, 11 September 2014, jam 11.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi